

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang" dan bertujuan untuk menganalisis bagaimana Perda tersebut diimplementasikan khususnya dalam pelayanan pendaftaran e-KTP, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menekankan pada dua variabel utama: isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 telah berjalan, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, terbatasnya infrastruktur dan peralatan perekaman, kurangnya ketersediaan blanko e-KTP, serta akses yang sulit bagi masyarakat di wilayah terpencil. Upaya jemput bola yang dilakukan Disdukcapil belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas aparatur, serta perluasan sosialisasi kebijakan ke seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan, e-KTP, Disdukcapil.

ABSTRACT

This study, entitled "Implementation of Regional Regulation Number 7 of 2016 Concerning Population Administration at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Deli Serdang Regency", aims to analyze how the regulation is implemented, particularly in the e-KTP registration service, and to identify the obstacles faced during the process. This research uses a descriptive qualitative approach, applying the policy implementation theory by Merilee S. Grindle, which emphasizes two main variables: the content of the policy and the context of its implementation. The findings reveal that although the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2016 has been carried out, several obstacles remain, such as limited human resources, inadequate recording infrastructure and equipment, shortages of e-KTP blank forms, and difficulties in access for residents in remote areas. The "jemput bola" (mobile service) strategy implemented by Disdukcapil has not yet reached all communities equally. Therefore, the effectiveness of the policy implementation still needs improvement through the optimization of facilities, capacity building of officers, and wider socialization of the policy across the Deli Serdang Regency area.

Keywords: Policy Implementation, Population Administration, e-KTP, Disdukcapil.